



Pembiayaan Pendidikan Islam

Financing Islamic Education

Edi Warmanto

Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Agam, Email : ediwarmanto@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01-02-2024

Revised : 03-02-2024

Accepted : 05-02-2024

Published : 06-02-2024

Abstract

The aim of this research is to find out how Islamic education is financed, especially in Indonesia. The research method used is library research. Education financing is all activities relating to the arrangement of sources, use and accountability for costs in schools or Islamic educational institutions. Islamic educational institutions that are common and often found in Indonesia are madrasahs and Islamic boarding schools. Funding for an educational institution is very important for determining educational programs to be able to run and develop. Without education funding, education will stagnate until it eventually ceases to operate. The sources of financing for Islamic education in Indonesia include: Government, through BOS and BSM funds, Foundations, Communities through SPP, foreign funding donors through grant funds sourced from Mecca and Medina. All of the above sources of funds collaborate with banking services to store all of these funds.

Keywords : Education Financing, Madrasah, Islamic Boarding School

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan pendidikan islam khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya di sekolah atau lembaga pendidikan islam. Lembaga Pendidikan islam yang umum dan banyak terdapat di Indonesia adalah madrasah dan pesantren. Pembiayaan pada sebuah lembaga pendidikan begitu penting untuk menentukan program pendidikan untuk dapat berjalan dan berkembang. Tanpa adanya pembiayaan pendidikan, maka pendidikan akan tersendat hingga akhirnya tidak beroperasi. Adapun sumber pembiayaan pendidikan islam di Indonesia antara lain: Pemerintah, melalui dana BOS dan BSM, Yayasan, Masyarakat melalui SPP, Donatur dana luar negeri melalui dana hibah bersumber dari Makkah dan Madinah. Seluruh sumber dana di atas, bekerjasama dengan jasa perbankan untuk menyimpan keseluruhan dana tersebut.

Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan, Madrasah, Pesantren



PENDAHULUAN

Mutu pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pendidikan terjadi proses transformasi informasi dan pengetahuan yang sistematis. Mutu pendidikan seringkali tertuju pada mutu lulusan, tetapi lulusan (*output*) yang bermutu tidak bisa tercapai apabila tidak melalui proses pendidikan yang bermutu pula. Menurut Oemar Hamalik, pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normative, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar. Dzaujak Ahmad mengemukakan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Jadi, mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat sehingga dapat melahirkan output yang bermutu (Fiandi & Sesmiarni, 2023).

Pada dasarnya, pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Sementara itu, pendidikan nasional dihadapkan persoalan peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. (Utama, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya Sari : 2020).

Sedangkan menurut Danandjaja (2014) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Pendidikan

Menurut Nanang Fattah (dalam Syukri, Sitompul, dan Banurea; 2020:2) pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Menurut Levin (dalam Masditou, 2017:125) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.

Pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya di sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut Tilaar, konsep biaya adalah keseluruhan biaya dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk pelayanan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari system pendidikan. Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, cetakan 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

Pembiayaan pada sebuah lembaga pendidikan begitu penting untuk menentukan program pendidikan untuk dapat berjalan dan berkembang. Tanpa adanya pembiayaan pendidikan, maka pendidikan akan tersendat hingga akhirnya tidak beroperasi (Fiandi & Junaidi, 2022).

Secara eksplisit kewenangan dan alokasi biaya pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29: “Biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU No. 23/2003 Tentang SISDIKNAS, n.d.)

Mengenai penganggaran pendidikan juga tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- b. Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan.



- c. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

Dalam pembiayaan pendidikan ada dua factor yang sangat berpengaruh didalamnya, yaitu factor eksternal dan factor internal. Factor eksternal terdiri dari berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi. Sedangkan factor internalnya adalah tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, dan tingkat dan jenis pendidikan.

Dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan financial.
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
- f. Melakukan revisi usulan anggaran
- g. Persetujuan revisi usulan anggaran
- h. Pengesahan anggaran

Perlu diketahui bahwa dalam organisasi skala kecil, anggaran biasanya disusun oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan dalam organisasi skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran.

Pembiayaan harus diatur dengan manajemen yang efektif, apalagi begitu banyak masalah yang telah terjadi di dalam manajemen pembiayaan. Masalah yang terjadi biasanya menyangkut pihak sekolah bahkan juga orang tua murid. Ada juga masalah yang pernah diperbincangkan oleh masyarakat seperti masalah undang-undang BHP yang memiliki efek pada pembiayaan pendidikan. Selain itu, permasalahan yang timbul pada manajemen pembiayaan pendidikan yaitu cara sebuah lembaga untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi pembiayaan pendidikan agar sekolah/Sekolah dapat berjalan sesuai sistem dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dan cakap masih begitu tidak efisien, sehingga sering terjadi kerugian.

Berdasarkan tinjauan dari sisi ekonomi, tidak ditemukan kegiatan pendidikan yang tidak ada biayanya, apalagi saat dikaitkan dengan kualitas proses dan hasil pendidikan. Menurut (Nanang, 2012: 10), semakin tinggi tuntutan kualitas semakin tinggi pula pembiayaan yang dibutuhkan. Biaya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses pendidikan. Berbeda dengan (Harsono, 2007: 9), pembiayaan pendidikan tergolong atas 4 jenis yakni biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa, biaya pendidikan yang bersumber dari sponsor dan perusahaan serta biaya pendidikan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri.



2. Pembiayaan Madrasah

Dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepatutnya dilakukan oleh Kepala Madrasah secara transparan dan bertanggungjawab. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa madrasahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke madrasah. Madrasah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.(Utama, 2020)

Adapun sumber pembiayaan di madrasah bisa dari: Pemerintah, melalui dana BOS dan BSM, Yayasan, Masyarakat melalui SPP, Donatur dana luar negeri melalui dana hibah bersumber dari Makkah dan Madinah. Seluruh sumber dana di atas, bekerjasama dengan jasa perbankan untuk menyimpan keseluruhan dana tersebut.(Mesiono et al., 2021)

3. Pembiayaan Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan dan dikelola oleh kyai/yayasan dengan sumber pembiayaan dari pesantren sendiri, uang bulanan syahriyah santri dan bantuan masyarakat dalam bentuk zakat, shodaqoh, infaq serta sedikit hiba dan waqaf. Oleh karena itu pondok pesantren merupakan praktik pendidikan berbasis masyarakat (community based education). Walaupun demikian pembiayaan pondok pesantren bisa didapatkan dari dana hibah yang berasal dari pemerintah, misalnya dari kementerian Agama.

Secara garis besar penggunaan dana atau pembiayaan pendidikan di pondok pesantren dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pengeluaran operasional (revenue expenditure), yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk semua kegiatan yang mendukung proses kegiatan mengajar, gaji guru dan dewan pengurus pondok, penyusutan aktiva tetap, biaya listrik dan telepon,
- b. Pengeluaran modal (capital expenditure) merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai barang modal aktiva tetap seperti membeli tanah, membangun lokal pesantren atau sekolah dan membeli peralatan perlengkapan pendidikan.(Utama, 2020)

Berbagai fakta pendidikan Islam, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang mampu hidup secara mandiri(Fiandi & Ilmi, 2022). Kemandirian itu tidak hanya dalam konsep pendidikan bagi para santrinya, tetapi juga dalam pengelolaan pesantren termasuk pendanaannya. Mastuhu (1994) melukiskan dengan tegas bahwa pesantren punya konsep biaya beberapa pun cukup, biaya berapapun tidak cukup. Ini melukiskan fleksibilitas pendidikan yang sangat tinggi. Bandingkan misalnya dengan konsep pembiayaan perguruan tinggi yang punya hukum biaya berapapun harus dihabiskan.

Pihak pihak yang terlibat dalam perencanaan pembiayaan sudah komprehensif oleh semua komponen pesantren, yaitu pemimpin pesantren (Kyai), yayasan, dan guru. Kesadaran yang tinggi dari para wali santri tentang pentingnya iuran mereka untuk kelangsungan pendidikan menyebabkan mereka tidak mempersoalkan besaran nominal yang harus mereka bayar. Ditambah dimensi religius yang mengedepankan sifat ikhlas, makanya biasanya para wali santri tidak keberatan.(Setiowati, 1386)

4. Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan



Sumbangan pendidikan terhadap bangsa bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tapi pendidikan yang bermutu dari sisi input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Beberapa faktor yang berkenaan dengan input pendidikan dapat dikelompokkan kedalam faktor rumah atau keluarga, faktor sekolah, dan faktor siswa. Diantara ketiganya, sekolah merupakan komponen input yang paling erat hubungannya dengan kebijakan pendidikan.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input institusi pendidikan (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dampak dari tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan juga berimbas pada proses dan output pendidikan. Proses pendidikan yang seharusnya bisa menghasilkan output yang bermutu kandas oleh factor sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai akibat dana yang tersendat.

Fakta mengatakan bahwa sejak dilaksanakan desentralisasi tahun 2001, yaitu penyerahan pengalokasian biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum terlaksana dengan baik. Hingga tahun ajaran 2004/2005 masih terdapat sebagian kabupaten atau kota yang tidak mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional sekolah dan sebagian besar lainnya mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai. Akibatnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja institusi pendidikan. Kinerja institusi pendidikan adalah prestasi institusi pendidikan yang dihasilkan dari proses atau perilaku institusi pendidikan. Kinerja institusi pendidikan dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output institusi pendidikan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri. Adapun gambaran mengenai pencapaian mutu dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. (Nur Zazin, 2011)

Karena begitu kompleksnya lembaga pendidikan, dalam mencapai mutu lembaga pendidikan antara lain ditandai oleh prestasi siswa di lembaga pendidikan dan diperlukan pengelolaan input secara maksimal. Oleh karenanya, diperlukan pengetahuan pemimpin atau manajer untuk mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan dan manajer agar pencapaian tersebut dapat dilaksanakan secara total sehingga pencapaian tujuan lembaga dapat dicapai secara efektif dan efisien.



Suatu system dikatakan efisien apabila menghasilkan keluaran yang lebih untuk sumber masukan (resources input). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, hanya akan ditemukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan untuk memacu pencapaian prestasi peserta didik. Dengan demikian, efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan.

Mengapa pendidikan harus bermutu? Menurut Deni Koswara dan Capi Triatna pendidikan saat ini dihadapkan berbagai tantangan baik nasional maupun internasional. Tantangan nasional muncul dari dunia ekonomi, politik, social, budaya, dan kemanan. Sedangkan tantangan internasional menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi persaingan global seiring dengan berlangsungnya globalisasi. (Deni Koswara dan Capi Triatna, 2011) Namun, “pendidikan bermutu itu mahal”, itulah asumsi masyarakat kita sekarang ini ketika ingin memasukkan anaknya untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dapat dirasakan dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.

Pemikiran diatas akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya, sebab kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan atau terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. Maka biaya pendidikan adalah faktor urgen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pengeluaran biaya pendidikan adalah indicator upaya keuangan Negara untuk investasi sumber daya manusia dan menunjukkan skala prioritas di antara sector-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara. Kebijakan pemerintah dalam pengeluaran anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN/APBD adalah bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui wilayah pendidikan. Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu agar pendidikan lebih bermutu, tanpa biaya yang memadai maka akan sulit menciptakan pendidikan bermutu dan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Sebagai bentuk perbandingan mengenai bagaimana kualitas pendidikan nasional, kita bisa berkaca pada Negara Malaysia. Ketika Indonesia masih berkuat pada upaya pemerataan pendidikan lewat SD-SD Inpres, Malaysia sudah berbicara pada tataran peningkatan kualitas pendidikan. Ketika Indonesia masih disibukkan perdebatan “ganti menteri ganti kurikulum”, Malaysia sudah menggagas apa yang mereka sebut “pendemokrasian pendidikan”. Ketika tokoh dan birokrat pendidikan di Indonesia sibuk berdebat tentang apa dan bagaimana sesungguhnya system pendidikan nasional, kemudian dilanjutkan tentang wacana seputar penbiayaan pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD, Malaysia sudah berbicara tentang bagaimana strategi mewujudkan suatu system pendidikan bertaraf internasional. (M. Rifai, 2011)



Menurut laporan United Nation Development Program (UNDP) tahun 2005 mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati posisi ke-110 dari 117 negara. Kemudian hasil survey Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada dibawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000) Indonesia memiliki daya saing yang rendah yaitu hanya menduduki urutan ke 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Pada tahun 2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP atau MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Konsep Total Quality Management menegaskan bahwa institusi dapat disebut bermutu apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa. Mutu yang pertama disebut *quality in fact* (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut *quality in perception* (mutu persepsi).

Dalam penyelenggaraannya, *quality in fact* merupakan profil lulusan institusi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan, yang berbentuk standar kemampuan dasar berupa kualifikasi akademik minimal yang dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan pada *quality in perception* pendidikan adalah kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan institusi pendidikan.

Dalam konteks aplikasi manajemen mutu dalam dunia pendidikan, Sallis mengaskan "Total Quality Management is a philosophy improvement, wich can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customers need, wants, and expectations." Manajemen mutu dalam pendidikan dapat disebut "mengutamakan pelajar" atau "program perbaikan sekolah" yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif.(Nur Zazin, 2011)

Semua lembaga atau institusi termasuk lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu seharusnya menentukan system mutunya sendiri(Fiandi, 2023). Dengan demikian, ia dapat mengawasi system dan prosedur standar sendiri, dengan cara menentukan standar mutu sendiri dan cara mencapainya, tidak perlu birokratis yang rumit.

KESIMPULAN

Biaya pendidikan adalah faktor urgen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pengeluaran biaya pendidikan adalah indicator upaya keuangan Negara untuk investasi sumber daya manusia dan menunjukkan skala prioritas di antara sector-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-



sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, hanya akan ditemukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan untuk memacu pencapaian prestasi peserta didik. Dengan demikian, efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiaunuha, M. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Darul Muttaqin Kecamatan Semendawai Timur OKU Timur. *Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)*, 3(2), 184–193.
- Deni Koswara dan Cepi Triatna. (2011). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan* (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (Ed.); 4th ed.). Alfabeta.
- Fiandi, A. (2023). Konsep Outcome Based Education (Obe) Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(oktoberr), 73–77.
- Fiandi, A., & Ilmi, D. (2022). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 206–218. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/999>
- Fiandi, A., & Junaidi. (2022). Sumber-Sumber Dana Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 10414–10421. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/4391>
- Fiandi, A., & Sesmiarni, Z. (2023). Implementasi Standar Mutu Dan Sasaran Mutu Pada Lembaga Pendidikan. *EduTeach : Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v4i1.4431>
- M. Rifai. (2011). *Politik Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media.
- Mesiono, Suswanto, S., Lubis, R. R., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 119–134. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6244>
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (cetakan pe).
- Nur Zazin. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan; Teori dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Setiowati, N. E. (1386). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq Cirebon Nur*. 1(2), 167–189.
- Utama, R. E. (2020). Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 117–134. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.2.117-134>
- UU No. 23/2003 tentang SISDIKNAS. (n.d.).